

## BAB VI

### DISKUSI DAN IMPLIKASI TEORITIK

Partisipasi masyarakat dalam mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak pada prinsipnya bisa dilaksanakan melalui kelompok atau perseorangan. Namun pada esensinya masyarakat bisa melaksanakan partisipasi yang dimulai dari adanya perencanaan pada Musyawarah Desa sampai dengan evaluasi pelaksanaan program dalam mempertahankan Desa Mandiri.

Keberhasilan pemerintah desa Sambonggede dalam mempertahankan desa mandiri tidak terlepas dari adanya masyarakat yang sudah turut andil dalam proses pembangunan. Namun dengan adanya partisipasi ini tentu ada kendala atau hambatan yang sudah dilewati oleh pemerintah desa. Salah satunya dalam proses pelayanan informasi yang hanya bisa dilaksanakan dengan cara manual dan belum bisa dilaksanakan melalui *website* desa. Hal ini disebabkan karena adanya *trouble website* desa yang sudah berulang kali dialami oleh pemerintah desa.

Partisipasi politik ini tidak hanya usaha dari pemerintah desa saja atau dari masyarakat saja. Namun, juga dilaksanakan secara Bersama-sama antara pemerintah desa dengan masyarakat untuk bisa mempertahankan desa mandiri. Oleh karena itu, pemerintah desa mendapatkan nilai IDM yang tinggi sehingga masuk dalam kategori Desa Mandiri dari tahun sebelumnya.

Bentuk partisipasi Menurut Yadav (Unapdi: 1980) ada empat macam kegiatan yang dapat menunjukkan bentuk partisipasi masyarakat yaitu:

1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak baik itu melalui kelompok maupun Individu dalam proses pengambilan keputusan bisa dilaksanakan dengan ikut serta dalam Musyawarah Desa. Sehingga ini menjadi awal masyarakat untuk bisa berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Setiap apa yang disampaikan masyarakat akan menjadi dasar bagi Pemerintah Desa untuk mengambil suatu keputusan yang berkaitan dengan Kebijakan dalam mempertahankan Desa Mandiri.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan

Partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan ini juga diikuti oleh masyarakat baik melalui kelompok atau perseorangan dalam hal merealisasikan kegiatan atau bahkan program yang sudah direncanakan oleh Pemerintah Desa Sambonggede. Pelaksanaan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sambonggede ini bisa dikatakan sukses dalam meralisasikannya. Hal ini tentu tidak bisa lepas dengan adanya partisipasi masyarakat. pelaksanaan program atau kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti adanya Badan Usaha Milik Desa yang selama ini sudah bisa berjalan dengan baik dan bisa memberikan Pendapatan Desa.

3. Partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi pembangunan

Partisipasi ini juga dilaksanakan oleh masyarakat melalui kelompok dan juga perseorang. Partisipasi ini dilaksanakan secara langsung bahwa masyarakat bisa ikut serta dalam pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Partisipasi ini bisa disampaikan kepada pemerintah Desa dengan cara bisa

dating langsung ke kantor Desa atau bisa juga melalui grup media sosial yang sudah dibuat oleh Pemerintah Desa.

#### 4. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan

Partisipasi ini juga dilaksanakan oleh masyarakat Desa Sambonggede baik itu secara perseorangan atau kelompok. Dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan masyarakat bisa ikut serta dalam memanfaatkan seluruh program yang sudah direalisasikan atau seluruh infrastruktur yang sudah dibuat oleh pemerintah Desa. Sehingga dengan adanya pembangunan ini diharapkan bisa berdampak pada pertumbuhan perekonomian masyarakat Desa.

Partisipasi yang sudah dilaksanakan oleh Masyarakat di Desa Sambonggede tersebut pada dasarnya sangat berefek pada setiap program atau rencana pembangunan yang dicanangkan oleh Pemerintah Desa. Partisipasi masyarakat ini bisa dikatakan sangat berpengaruh dalam mempertahankan Desa mandiri di Desa Saambonggede. Sebab dengan adanya partisipasi ini, seluruh program bisa berjalan dengan baik dan lancar. Sehingga Indeks Pembangunan Desa hasil penilaian dari pemerintah yang diberikan kepada Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak sebera 852 pada tahun 2022 ini. Sehingga Desa Sambonggede dinyatakan sebagai Desa yang mandiri.

Partisipasi politik ini menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan modernisasi politik. Sebab dalam Desa Mandiri tidak bisa lepas dengan yang Namanya Modernisasi Politik dalam sebuah konsep Pembangunan Politik. Lucian W Pye merumuskan berbagai macam pembangunan politik. Diantaranya, Pertama,

pembangunan politik sebagai prasyarat politik untuk pembangunan ekonomi. Pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sambonggede dalam mempertahankan Desa Mandiri salah satu orientasinya adalah untuk perbaikan perekonomian Masyarakat. Sehingga nilai Indeks Desa Membangun yang dimiliki oleh Desa Sambonggede pada Tahun 2022 ini sebesar 843 dengan kategori baik.

Kedua. Pembangunan politik sebagai kehidupan politik khas masyarakat industri. Masyarakat industri menciptakan jenis kehidupan politik tertentu yang dapat ditiru masyarakat lain. Pembangunan politik sebagai suatu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara politik atau strategi-strategi tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sarannya, cara atau strategi tertentu ini dapat digunakan oleh Negara, institusi/organisasi, ataupun partai politik dan juga oleh individu ataupun kelompok masyarakat sipil. Pada sisi pembangunan politik dalam aspek ini, Pemerintah Desa Sambonggede mencanangkan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan jumlah pekerja industry atau pengusaha *home industry*.

Ketiga, pembangunan politik sebagai modernisasi politik. Pembangunan politik adalah kehidupan khas atau kehidupan ideal dari masyarakat industri berpadu erat dengan pandangan bahwa pembangunan politik sama dengan modernisasi politik. Ukuran modernisasi politik adalah partisipasi politik, tuntutan hukum yang universal, penghormatan atas kemampuan daripada keturunan, keadilan dan kewarganegaraan. Modernisasi politik ini menjadi salah satu indikator dalam mempertahankan Desa mandiri. Sebab dalam modernisasi ini ada

partisipasi politik yang kemudian menjadi salah satu faktor dalam mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak.

Keempat, Pembangunan politik sebagai operasi negara kebangsaan. Pembangunan politik menjadi proses melalui mana masyarakat-masyarakat yang merupakan negara kebangsaan dalam bentuk dan berdasarkan pengakuan internasional menjadi negara kebangsaan dalam arti sesungguhnya. Ukuran pembangunan politik terdiri atas, Pertama Penciptaan serangkaian lembaga-lembaga pemerintah dan negara yang merupakan bagian dari prasarana negara kebangsaan. Kedua Pernyataan secara tertib dalam kehidupan politik dari pada fenomena nasionalisme yang dijalankan dalam kerangka lembaga-lembaga kenegaraan. Pembangunan Politik ini lebih kepada aspek kenegaraan. Namun jika ditinjau dari aspek Desa, Desa Sambonggede sudah memiliki lembaga-lembaga yang berkaitan seperti BPD, PKK, BUMDes, dan lain sebagainya.

Kelima, pembangunan politik sebagai pembangunan administrasi dan hukum. Jika pembinaan bangsa dibagi dalam pembinaan lembaga-lembaga dan pembinaan kewarganegaraan, maka selanjutnya akan timbul dua pengertian yaitu yang disebut pembinaan administrasi dan pembinaan hukum (menciptakan tata susunan administrasi dan tata susunan hukum). Pemerintah Desa Sambonggede dalam pembangunan administrasi dan hukum selalu didasarkan dari adanya Musyawarah Desa yang melibatkan seluruh elemen masyarakat atau pemangku kepentingan dalam berbagai sektor pembangunan.

Keenam, pembangunan politik sebagai mobilisasi masa dan partisipasi. Sisi lain dari pembangunan politik berkisar pada peranan warga negara serta ukuran-

ukuran baru dibidang kesetiaan dan partisipasi rakyat. Pembangunan ini menjadi salah satu aspek yang krusial dalam mempertahankan Desa Mandiri. Namun Desa Sambonggede sudah melaksanakan pembangunan politik ini. Sehingga dalam pembangunan monilisasi masa dan partisipasi menjadi salah satu indikator dalam suksesnya Desa mandiri di Desa Sambonggede.

Ketujuh, pembangunan politik sebagai pembinaan demokrasi. Pembangunan politik seharusnya sama dengan diciptanya lembaga-lembaga dan praktek-praktek demokrasi. Pembangunan politik yang sungguh-sungguh mempunyai arti sebagai pembinaan demokrasi. Pembangunan hanya bermakna dalam bentuk salah satu ideology (apakah demokrasi, komunisme atau totaliterisme) dan memperkuat kerangka nilai-nilai tertentu. Pembangunan politik sebagai pembinaan Demokrasi sudah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sambonggede, salah satunya dengan adanya Musyawarah Desa yang dilaksanakan secara tentatif sebagai salah satu wujud bahwa setiap masyarakat berhak untuk mengajukan pendapatnya dalam proses pembangunan desa.

Mempertahankan Desa Mandiri di Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban memiliki kunci utama, yaitu partisipasi Politik masyarakat. Namun juga memiliki strategi dalam membangun kemandirian desa. Yaitu, yang pertama adalah pembangunan kapasitas masyarakat dan organisasi. Arah pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Sambonggede yaitu menuju masyarakat yang kritis dan dinamis.

Kedua adalah memperkuat kapasitas pemerintah dan interaksi. Pembangunan ini dilaksanakan oleh Desa Sambonggede Kecamatan Merakurak

Kabupaten Tuban untuk memperlancar komunikasi antara organisasi atau individu dan juga pemerintah Desa. Sehingga dalam pelaksanaan berbagai program yang dicanangkan untuk mempertahankan kemandirian Desa bisa berjalan dengan lancar dan sukses dalam realisasinya.

Ketiga, membangun sistem perencanaan dan penganggaran desa yang responsif dan partisipatif. Desa Sambonggede dalam mewujudkan desan mandiri sudah menyusun perencanaan yang melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Hal ini tentu berdasarkan prinsip penyusunan Rencana jangka menengah Desa Sambonggede. Selain itu, dalam proses penganggaran juga dilaksanakan secara transparan dan setiap masyarakat bisa berpartisipasi dalam pengawasan anggaran yang sudah direalisasikan oleh Pemerintah Desa.

Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sambonggede salah satunya juga mengarah kepada Ekonomi lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. selain itu, juga dilaksanakan pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah Desa demi meningkatnya produktifitas masyarakat dalam menompang perekonomiannya.